

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV, maka pada Bab V ini penulis akan merumuskan beberapa simpulan sebagai inti sari dari hasil penelitian ini. Pada bagian akhir, penulis mengajukan implikasi dan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai penelitian dengan judul Implementasi Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang di Bidang Pendidikan.

Simpulan akan dipaparkan menjadi dua bagian, yaitu simpulan umum dan khusus untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Sedangkan, implikasi merupakan pemaparan penulis mengenai dampak yang dihasilkan dari penelitian ini, serta rekomendasi ditujukan penulis untuk beberapa pihak terkait.

5.1 Simpulan dari Temuan dan Pembahasan

5.1.1 Simpulan Umum

Secara umum, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang yang sudah berjalan selama enam puluh tahun sejak tahun 1958 ini diawali dengan keinginan pihak Jepang untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama Indonesia.

Adapun hubungan diplomatik di bidang pendidikan pada mulanya tampak dalam kebijakan pemberian ganti rugi oleh Pemerintah Jepang dengan bentuk beasiswa kepada para mahasiswa di Indonesia yang berminat menempuh pendidikan di Jepang. Kemudian, secara *de jure* kedua negara pun membentuk perjanjian mengenai kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 1981.

Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang di bidang pendidikan ini sejauh ini tampak berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Jepang dan sebaliknya pula. Selain itu, banyak terlibatnya perusahaan dan yayasan dalam program-program pendidikan pun menandakan bahwa diplomasi Indonesia di bidang pendidikan terhadap Jepang telah berhasil dijalankan.

5.1.2 Simpulan Khusus

Di samping simpulan umum di atas, dapat diuraikan pula simpulan secara khusus sebagai berikut:

- 1) Landasan hukum hubungan diplomatik Indonesia-Jepang secara khusus adalah Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Ganti Rugi Perang yang disepakati pada tahun 1958. Kemudian, landasan hukum yang lebih spesifik di bidang pendidikan adalah Perjanjian Kerja Sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang disepakati pada tahun 1981. Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang secara tertulis dimulai pada 20 Januari 1958, dan secara operasional dimulai pada 15 April 1958 seiring dengan didirikannya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo.
- 2) KBRI maupun KJRI sebagai Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, bertugas untuk menyambungkan kedua negara Indonesia-Jepang di berbagai bidang. KBRI dan KJRI juga berperan sebagai rumah dan pusat perlindungan bagi para pelajar/mahasiswa Indonesia yang sedang sekolah di Jepang. Menyediakan layanan pelaporan bagi pelajar/mahasiswa yang datang, izin libur, atau telah menyelesaikan studi, serta menyebarkan informasi penting melalui laman resmi KBRI dan KJRI melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan serta Fungsi Sosial Budaya.
- 3) Di bidang pendidikan, KBRI dan KJRI juga memiliki program yang beragam, terutama secara diplomatik, KBRI dan KJRI menegosiasi dan mencari informasi kepada pemerintah Jepang seperti kebijakan beasiswa untuk warga negara Indonesia. Tidak hanya kebijakan menjemput bola, KBRI dan KJRI juga menyediakan penawaran program Beasiswa Darmasiswa dari pemerintah Republik Indonesia yang ditujukan kepada warga negara asing, terutama warga negara Jepang yang berminat untuk menempuh studi di Indonesia. Kerja sama di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Indonesia dan Jepang, tidak hanya sebatas melalui kantor perwakilan, namun terdapat banyak di berbagai yayasan, perusahaan, bahkan *U to U* atau antar-universitas.
- 4) Sejauh ini hubungan diplomatik Indonesia-Jepang sudah berjalan dengan lancar dan tidak terdapat kendala yang bersifat fundamental, karena pihak Jepang sudah memiliki budaya kerja dalam birokrasi yang bersifat efektif dan

efisien. Kendala dalam kerja sama pendidikan tentu muncul dalam ranah teknis. Masih banyak masyarakat Jepang, terutama generasi tua yang memiliki pandangan sebelah mata terhadap pendatang dari Indonesia yang notabene dari Asia. Selain itu, perbedaan budaya, agama, dan kebiasaan sehari-hari juga sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program pendidikan karena pemahaman mengenai perbedaan belum menyeluruh.

- 5) Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam hubungan diplomatik Indonesia-Jepang di bidang pendidikan, pihak perwakilan menyebutkan harus banyaknya kerja sama dengan instansi dan yayasan, serta perusahaan dalam menciptakan kerja sama di bidang pendidikan. Selain itu, untuk mengatasi kendala yang muncul di ranah teknis, pemberian pemahaman kepada orang Indonesia yang akan menempuh studi di Jepang dan sebaliknya, perlu ditingkatkan dan diperbanyak frekuensinya. Kualitas negosiasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat Indonesia yang akan belajar di Jepang dapat mendapatkan kebijakan yang tidak melenceng dari norma-norma agama yang dimiliki. Untuk itu, perlu adanya pertukaran budaya yang dilakukan oleh aktor-aktor akademik.

5.2 Implikasi dari Temuan dan Pembahasan

Suatu penelitian yang telah dilakukan, khususnya lingkungan pendidikan dan masyarakat, maka simpulan yang ditarik memiliki beberapa implikasi. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, ditambah dengan kajian terhadap beberapa literasi, penelitian ini memiliki implikasi yang bersifat mengembangkan khazanah keilmuan secara teoretis maupun praktis.

- 1) Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang di bidang pendidikan selama ini belum banyak dikaji secara spesifik dengan mendalami peran-peran KBRI dan KJRI. Maka dari itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, terutama mengenai kualitas diplomasi perwakilan pemerintah Indonesia terhadap negara lain yang bertujuan tidak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan juga perlu menyentuh lebih dalam hal-hal yang berkaitan dengan hubungan internasional

Indonesia, karena pada dasarnya, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan warga negara yang baik, tetapi juga menciptakan warga dunia (*global citizens*) yang baik.

- 2) Penelitian ini menghasilkan sebuah kajian yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Nugraha (2017) yang fokus pada kebudayaan. Penelitian ini tidak menganggap kebudayaan merupakan unsur tunggal dalam hubungan diplomatik antara Indonesia-Jepang, melainkan kebudayaan juga termasuk dalam diplomasi pendidikan, karena dalam pelaksanaan pendidikan, nilai-nilai dan pengetahuan mengenai kebudayaan secara tidak langsung tersampaikan. Penelitian ini juga tidak hanya fokus terhadap yayasan yang terlibat dalam kerja sama Indonesia-Jepang, namun fokus terhadap perwakilan pemerintah yang merupakan lembaga fundamental dalam hubungan kerja sama bilateral.
- 3) Hasil dari penelitian ini menambah khazanah keilmuan pendidikan kewarganegaraan, terutama yang terkait dengan hubungan internasional dan praktiknya di lapangan. Selain itu, memperkenalkan pula konsep-konsep diplomasi yang merupakan salah satu pengetahuan penting dalam pergaulan internasional. Selain itu juga menghimpun upaya-upaya strategis yang dapat digunakan ke depannya dalam berdiplomasi agar kepentingan bangsa Indonesia di panggung internasional dapat dipenuhi namun tetap dalam hubungan kerja sama yang harmonis dengan negara lain.

5.3 Rekomendasi dari Peneliti terhadap Pihak Terkait

Hasil penelitian, sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan, baik di lapangan maupun secara teoretis, maka beberapa hal dapat menjadi bahan rekomendasi.

- 1) Bagi Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia

KBRI dan KJRI hendaknya mempererat kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai instansi dan yayasan untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pendidikan antara Indonesia dengan Jepang. Selama ini, instansi pendidikan maupun yayasan bergerak secara masing-masing, sering kali bahkan tanpa koordinasi dengan pihak KBRI atau KJRI. Ada baiknya KBRI

dan KJRI menghimpun instansi pendidikan dan yayasan yang hendak menjalankan hubungan kerja sama pendidikan dengan Jepang, agar kualitas dari kerja sama tersebut semakin meningkat dan bersifat jangka panjang.

Pihak KBRI dan KJRI juga hendaknya membuat sebuah regulasi bagi warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Jepang untuk wajib melapor kepada kantor perwakilan. Hal tersebut bertujuan untuk mendata jumlah pelajar Indonesia di Jepang dan juga dapat menjadi bahan pantauan agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum, terutama hukum keimigrasian. Selain itu, dengan diwajibkannya melapor, pihak perwakilan dapat mengakses data pelajar Indonesia, sehingga ketika terjadi pengaduan atau masalah, pihak perwakilan dapat memberikan pendampingan kepada yang bersangkutan hingga tuntas.

2) Bagi Departemen PKn FPIPS UPI

Pihak Departemen PKn hendaknya mengarahkan mahasiswanya untuk menempuh studi lanjutan setelah menyelesaikan studi di strata satu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan agar lulusan dapat berkontribusi pada dunia pendidikan dengan bekal ilmu yang mumpuni. Selain itu, Departemen PKn juga direkomendasikan untuk meningkatkan moral dan perilaku mahasiswanya melalui studi banding dengan instansi pendidikan Jepang, dengan cara menyelenggarakan seminar, *visiting professor*, atau bahkan pertukaran mahasiswa.

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Departemen PKn yang tertarik dan minat untuk meneliti hubungan internasional, terutama peranan yang dipegang oleh Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri dan implementasinya pada Indonesia. Departemen PKn juga hendaknya memberikan pemahaman yang luas melalui kajian-kajian hubungan internasional kepada mahasiswa agar mahasiswa paham mengenai peran Indonesia di dunia dan bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta pendidikan melalui itu.

3) Bagi Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik Indonesia hendaknya memberikan pemahaman kepada mahasiswa atau siswa, bahwa salah satu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia adalah melalui studi di luar negeri, terutama di Jepang. Mengingat

kualitas pendidikan di Jepang dapat dikatakan sangat baik, sehingga banyak hal yang dapat diterapkan di Indonesia. Tenaga pendidik hendaknya tidak hanya membimbing mahasiswa atau siswanya kepada karier yang sukses, namun bagaimana caranya agar perilaku dari mahasiswa atau siswa dapat menjadi lebih bermoral, juga agar mahasiswa atau siswa di kemudian hari dapat berkontribusi pada dunia pendidikan Indonesia.

4) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa hendaknya lebih memiliki pemikiran yang *open minded* terhadap perbedaan, sehingga dengan mudah dapat menerima dan menerapkan hal-hal positif yang terdapat di dunia pendidikan Jepang untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Mahasiswa juga hendaknya mencari dan menemukan peluang untuk menempuh studi lanjutan di luar negeri, terutama di Jepang karena di era saat ini, tingkat sarjana saja masih dikatakan kurang cukup untuk berkarier dan memajukan pendidikan Indonesia. Sehingga, sangat direkomendasikan untuk menempuh studi lanjutan, selain untuk karier juga untuk memajukan pendidikan Indonesia.

5) Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya memiliki wawasan yang terbuka terhadap pendidikan, sehingga memiliki mental dalam pendidikan yang siap memasuki era global. Melalui kerja sama pendidikan, masyarakat juga hendaknya dapat menerapkan hal-hal positif dalam moral dan perilaku ke dalam kehidupan sehari-hari, guna meningkatkan kualitas dari kehidupan masyarakat secara moral dan etika.

6) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dirasa belum cukup, baik bagi peneliti maupun *civitas academica* lainnya. Maka dari itu, harus dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai penelitian implementasi hubungan diplomatik Indonesia-Jepang di bidang pendidikan, sehingga mampu memberikan jawaban secara akurat dan komprehensif. Selain itu, sebaiknya pula mendalami kinerja serta program-program dari Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia dari tahun ke tahun, sehingga proses dari hubungan diplomatik dan kerja sama dapat dipahami dengan jelas. Juga lebih banyak melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga diharapkan dapat memberi masukan terhadap Perwakilan Pemerintah Republik

Indonesia sebagai penyambung pemerintah Indonesia dengan Jepang, terutama dalam kerja sama pendidikan.